

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra menjadikan posisi Indonesia menjadi negara yang paling strategis dikawasan Asia Pasifik. Letak geografis yang strategis itu betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam, flora, fauna, dan potensi hidrografis, dan deposit sumber daya alamnya yang melimpah.



*Gambar 1 Letak Geografis Indonesia*

(Sumber [www.petaindonesia.com](http://www.petaindonesia.com).)

Hal ini kemudian mengundang banyak negara besar yang berkepentingan untuk menjalin kerja sama baik di bidang politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. mengenai pertahanan dan keamanan kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat mempunyai hubungan yang cukup erat. Salah satu peran penting Amerika Serikat adalah dalam perundingan paska proklamasi kemerdekaan terutama saat pembebasan Papua Barat, menjadi awal

hubungan kerja sama yang berlanjut pada bantuan penuh kemiliteran AS terhadap Indonesia demi menjauhkan kawasan Asia Pasifik dari paham komunisme.

Seperti yang kita ketahui Hubungan antara Amerika dengan Indonesia merupakan *love and hate relationship*. Suatu ketika hubungan antara kedua negara bisa sangat dekat dan di lain waktu hubungan Indonesia dengan Amerika menjadi renggang. Pada saat pemerintahan Soekarno hubungan kedua negara tidak berlangsung baik hal ini dikarenakan Soekarno yang beraliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang tidak sejalan dengan pola pemerintahan Amerika yang mengutamakan demokrasi dan liberalisasi. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa G30S/PKI yang merupakan upaya Amerika untuk menggulingkan presiden Soekarno. <sup>1</sup>

Naiknya presiden Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno membawa angin segar bagi hubungan Indonesia dan Amerika. Soeharto merupakan jenderal TNI yang pro terhadap kebijakan Amerika, Karena bagi Amerika yang terpenting negara-negara tidak menganut paham komunisme. Sehingga keterbukaan presiden Soeharto disambut baik oleh pihak Amerika, kemudian Soeharto bersikeras akan penyerangan di wilayah Timor-Timur Karena di wilayah tersebut terdapat partai Fretlin yang berkiblat paham komunisme. Dengan alasan, mencegah penyebaran komunisme di wilayah

---

<sup>1</sup> "hubungan Indonesia dan Amerika sebelum dan sesudah embargo" di akses dari: [www.embassyofindonesia.org](http://www.embassyofindonesia.org).

tersebut Soeharto meminta izin kepada Amerika untuk melakukan penyerangan. Invansi Indonesia tersebut di dukung penuh oleh Amerika dengan memberikan bantuan alutsista.

Namun, hubungan tersebut sempat mengalami pasang surut, terutama ketika Amerika Serikat mengeluarkan embargo senjata yang disebabkan konflik internal Indonesia di wilayah Timor-Timur di tahun 1991. Peristiwa penembakan di gereja Santa Cruz dan Balibo Five menjadi hambatan bagi keberlangsungan hubungan kedua negara. Indonesia dianggap tidak lagi memenuhi prasyarat yang muncul di Tengah perubahan kepentingan Amerika Serikat yaitu penegakan HAM dan demokrasi. Di era embargo Indonesia cukup mengalami kesulitan pengembangan kemiliteran baik dalam bidang pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) maupun pengembangan sumber daya.<sup>2</sup>



*Gambar 2 Konflik internal Indonesia di wilayah Timor-Timur 1991*

(sumber : [www.bing.com](http://www.bing.com))

---

<sup>2</sup> <http://dunia.vivanews.com>

Sebagai negara yang memiliki kekurangan di bidang pertahanan, Indonesia mengalami dampak negatif atas diberlakukannya embargo militer Amerika Serikat. Kurangnya pasokan peralatan tempur membuat pemerintah Indonesia mencari bantuan melalui kerjasama dengan negara lain. Rusia merupakan salah satu negara yang dipilih Indonesia sebagai mitra kerjasama militer. Hubungan antara Indonesia dan Rusia berlangsung baik sejak masa pemerintahan presiden Megawati pada saat kunjungan pertama Megawati ke Rusia pada April 2003. Dalam kesempatan tersebut kedua kepala negara menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam abad XXI. Megawati dan Vladimir Putin menyepakati dilakukannya kerjasama teknik militer yang lebih erat di masa depan.

Pengadaan alutsista dari Rusia saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Merupakan Alasan pemilihan Rusia dibandingkan dengan negara lain seperti menggunakan produk Amerika Serikat atau Eropa, selain harganya lebih mahal tentu akan ada hambatan politis yang bisa menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Rusia umumnya tidak menyulitkan dalam hal lisensi, izin dan politik.

Pembelian alutsista dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, umumnya dirumitkan dengan persyaratan penegakan HAM (dikaitkan masalah Aceh, Poso atau Papua), masalah lisensi, dan prosedur pembelian yang rumit.

Pengalaman dengan Inggris misalnya, tank Scorpion dan panser serbu Stromer untuk operasi menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak boleh dipakai di Aceh karena terkait syarat kerja sama hanya untuk pertahanan luar.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), militer Indonesia seperti bangkit kembali ini tidak terlepas dari peran presiden Indonesia yang berlatar belakang militer. Pada November 2005, Amerika Serikat menghentikan embargo kepada Indonesia dan kembali menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika seperti sebelumnya, Namun hal ini juga merupakan saat yang tepat bagi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono untuk melanjutkan kembali kerjasama strategis dengan Rusia. Untuk mempererat hubungan kedua negara telah disepakatinya untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM) yang ditandatangani dalam sidang komisi pertama di Rusia pada tanggal 27 September 2005.<sup>3</sup>

Bekerjasama dengan Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke Barat. Tetapi, menunjukkan bahwa membuka kerjasama dengan Rusia adalah upaya pelurusan kembali praktek kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak pernah memusuhi barat dan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang besar agar tidak selalu terhambat. Baik oleh hambatan politik atau hambatan lainnya.

---

<sup>3</sup> Fardiansah Noor, "DPR Dukung Penuh Kebijakan Politik Bebas Aktif", di akses dari: [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) pada tanggal 18 november 2016.

Pada pertemuan kedua kepala negara tersebut, telah disepakati bentuk kerjasama di bidang militer, politik, dan ekonomi. Adapun bentuk kerjasama di bidang militer yang akan dilakukan dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Dalam kerjasama ini Rusia memberikan pinjaman *state credit* 1 Miliar Dolar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. *State credit* merupakan sistem kredit negara antara Indonesia dan Rusia yang memiliki periode selama 5 tahun untuk pengadaan kebutuhan alutsista yang sudah disepakati pemerintah Indonesia.<sup>4</sup>

Penentuan dan pelaksanaan kerjasama pertahanan militer Indonesia dengan Rusia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer negara yang mencakup perkembangan alutsista Indonesia pada saat itu. Terkait dengan penambahan kualitas dalam bidang kekuatan militer, Rusia menjadi salah satu negara yang tepat untuk menjalin kerjasama militer.

Kebutuhan Indonesia akan senjata militer semakin besar. Sedangkan kerja sama dalam bidang keamanan dan militer yang dianggap paling tepat, yaitu dengan kawasan seperti Asia tenggara tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keamanan militer Indonesia. Kebutuhan ketahanan ini menuntut Indonesia untuk mencari strategi baru. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak

---

<sup>4</sup> Bambang H, "Indonesia Mempererat Hubungan Militer Dengan Rusia", di akses dari: [www.politikindonesia.com](http://www.politikindonesia.com) pada tanggal 18 november 2016.

alternatif kerja sama dengan berbagai negara selain Rusia yang juga memiliki cadangan senjata. Walaupun Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai kawasan seperti Amerika Serikat dan Eropa, namun kerja sama tersebut tidak menjadi prioritas penguatan kerja sama. Sebaliknya, Indonesia lebih memilih bekerjasama dengan Rusia sebagai prioritas. Padahal, Amerika Serikat dan Rusia saling bersaing dalam penjualan senjata di dunia.

## **B. Pokok Permasalahan**

Penjelasan dari permasalahan tersebut kemudian akan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah Indonesia pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kerjasama militer dengan Rusia tahun (2004-2009) ?

## **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

‘Untuk menganalisa permasalahan yang ada, digunakan kerangka pemikiran baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### **Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**

Kajian mengenai teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*the decision making process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan

pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bias memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>5</sup>

Menurut Wiliam D.Coplin, teori pengambilan keputusan luar negeri atau foreign policy, yaitu :<sup>6</sup>

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsideransi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi didalam negeri yang akan membuat keputusan , yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.

---

<sup>5</sup> Mohtar Mas'ood , *Ilmu hubungan internasional disiplin ilmu dan metodologi*, Yogyakarta: LP3ES 1990,

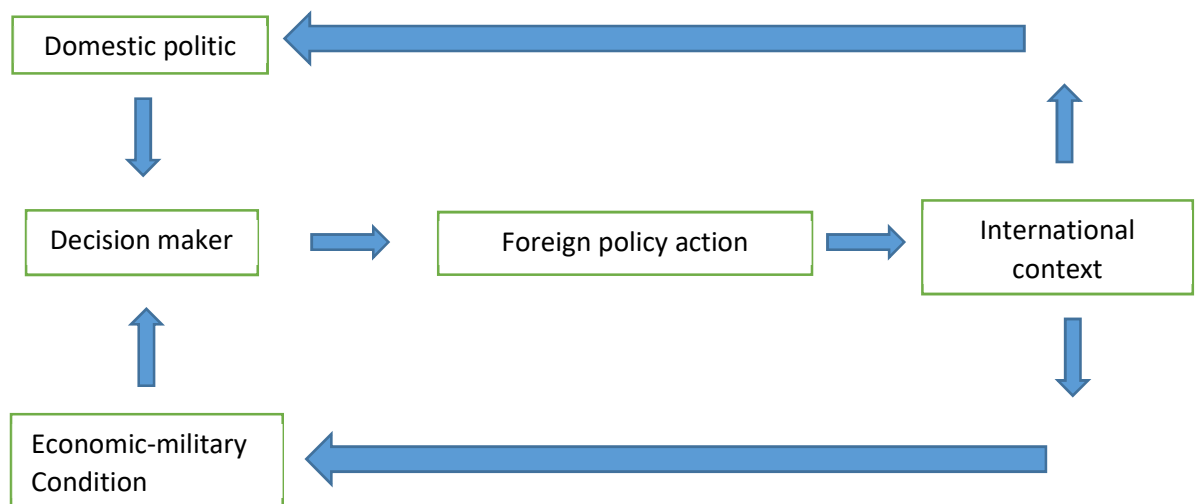
<sup>6</sup> William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional: suatu telaah teoritis*,( Bandung, Sinar Baru;1992) hal 30.



- b. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Bagaimana empat determinan mempengaruhi politik luar negeri



Gambar 3 Empat Determinan Mempengaruhi Politik Luar Negeri

(Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional)

Menurut gambar diatas, politik luar negeri suatu negara di pengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta kontek internasional. Akan tetapi pengambil keputusan luar negeri berada di bawah perintah presiden sebagai pengemban tugas negara.

Faktor politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Ketiga Faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya kebijakan menjalin kerjasama pertahanan dan militer dengan Rusia. Dimana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi dan militer serta konteks internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan luar negeri.

#### **a. Politik Dalam Negeri**

Jika dilihat dari situasi politik dalam negeri, kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada korelasi antar pengambil keputusan (*decision makers*) dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan "*policy influence*" (yang memengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut "*policy influence system*" (*system* pengaruh kebijakan).

Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik.<sup>7</sup> Di satu sisi, pengambilan keputusan membutuhkan *policy influencers* Karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambilan keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan

---

<sup>7</sup> William D. Coplin. *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis* terj. M.Marbun ,edisi kedua. Bandung: Pustaka Sinar Baru, 1992. Hal 74-76

sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalin kerjasama dibidang pertahanan dan militer dengan Rusia dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan yang di atur dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009 yang didukung oleh DPR dimana presiden SBY mendapatkan dukungan hampir 65% dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **b. Ekonomi dan Militer**

Bagi Indonesia, inovasi sistem pembelian senjata penting dilakukan untuk mengurangi beban devisa dan efek-efeknya pada neraca pembayaran, serta menstimulasi perkembangan industri pertahanan domestik. Beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai negara produsen persenjataan militer terbaru bagi TNI, yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> [http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerjasama-dengan-rusia/diakses 8 november 2016](http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerjasama-dengan-rusia/diakses%208%20november%202016), jam 21.00 wib.

1. Sejarah hubungan militer Indonesia-Rusia.
2. Kemudahan persyaratan kerja sama bidang pertahanan militer dari Rusia.
3. Rusia lebih fleksibel mengenai harga.
4. Rusia memiliki teknologi militer yang sepadan dengan Eropa dan USA.

Indonesia dan Rusia telah menyepakati dibentuknya Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Bentuk kerjasama pertahanan dan militer yang akan dilakukan Indonesia dan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain itu juga, diusahakan peningkatan kemampuan manajemen perwira dengan bersekolah setingkat Lemhanmas di Indonesia atau sebaliknya. Serta peningkatan pasukan khusus, misalnya pelatihan spesialisasi pilot pesawat dan spesialisasi awak kapal selam.

Rusia memberikan pinjaman *state credit* 1 milyar dollar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. Kredit negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, Karena tidak memakai management fee dan syarat lainnya. Kementerian pertahanan RI menggunakan pinjaman yang diberikan Rusia untuk pengadaan helicopter MI-17-V5 dan helicopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD untuk kebutuhan helicopter serbu dan transportasi; kapal selam kelas kilo dan kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL; TNI AU yang menjadi prioritas, akan melengkapi satu skuadron pesawat tempur Sukhoi,

dimana sebelumnya Indonesia telah memiliki 4 sukhoi. Setelah 4 sukhoi di persenjatai, maka akan dilanjutkan dengan pengadaan paket peralatan avionic dan persenjataan sukhoi TNI AU.

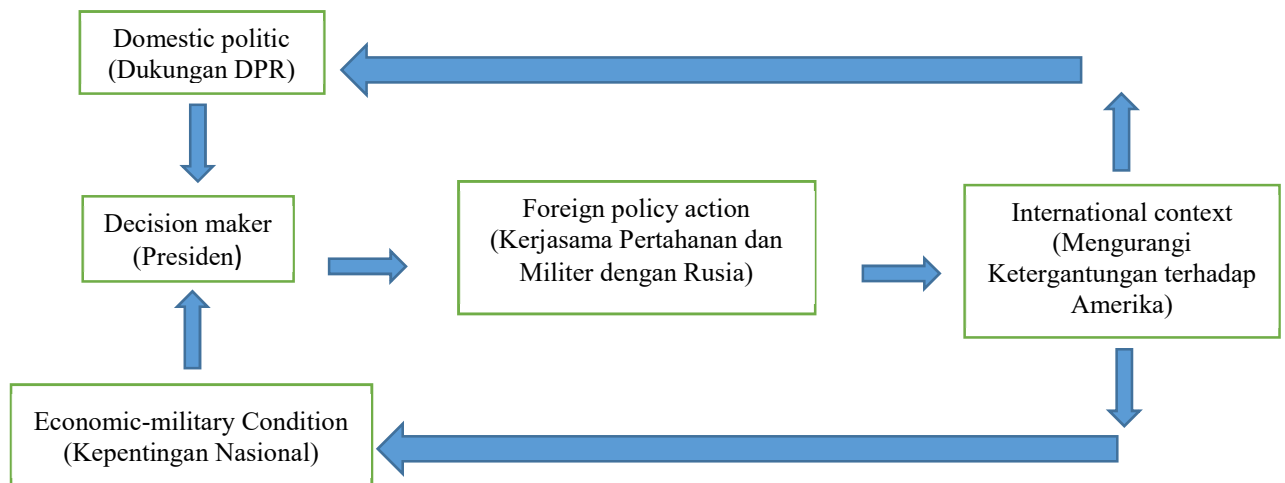
Sedangkan di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia memberikan intensif bagi investasi Rusia yang akan masuk ke Indonesia tujuannya adalah agar investasi Rusia yang masuk ke Indonesia dapat berlangsung dengan lancar dan tidak ada keraguan dari pengusaha-pengusaha Rusia untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada oktober 2009 pun terbentuklah *Joint Business Council Indonesian-Rusia*. Badan tersebut dibentuk untuk memajukan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Melalui forum ini, perusahaan-perusahaan Indonesia akan melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Rusia di bidang minyak dan pertambangan, pertamina dengan Lukoil (minyak bumi), PT. Antam dengan RusAl (bauksit), PT.Minang jordanindo.

### **c. Konteks Internasional**

Dalam konteks internasional kerjasama di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia dipengaruhi Karena Rusia merupakan pilihan yang tepat saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Kerjasama dengan Rusia merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dalam bidang persenjataan yang saat itu telah

mencapai 70%. Selain itu sebagai aplikasi prinsip politik bebas aktif, Indonesia tidak akan melakukan kerjasama aliansi strategis dengan negara lain. Aliansi strategis akan dinilai sebagai sebuah keberpihakan pada kekuatan politik dunia tertentu dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kerjasama strategis dinilai dapat mengakomodasi bentuk kerjasama lebih dalam dan kuat dengan negara lain, tanpa mengharuskan adanya aliansi. Indonesia telah menjalin kerjasama strategis dengan beberapa negara diantaranya Rusia, India, dan Amerika Serikat.

#### **Aplikasi gambar teori pengambilan keputusan luar negeri**



Gambar 4 Teori pengambilan keputusan Luar Negeri

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan keterangan dalam kerangka pemikiran dan aplikasinya, maka penulis mengambil hipotesa bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan luar negeri untuk menjalin kerjasama militer dengan Rusia di pengaruhi oleh bebera faktor :

1. Politik dalam negeri, yaitu keinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan dan kemanan negara Indonesia.
2. Kepentingan ekonomi dan militer yang bertujuan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan wilayah Indonesia untuk mengimbangi kekuatan Amerika serikat di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Serta konteks internasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dalam bidang persenjataan.

#### **E. Jangkauan Penulisan**

Penulis menetapkan Jangkauan penulisan dengan tujuan mempermudah penulis dalam proses penelitian. Secara umum penulis membatasi penelitian pada politik luar negeri di masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil referensi terkait peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terkait dan dapat mendukung penelitian dalam penulisan skripsi.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian penulis dalam mengkaji kasus Kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama Militer dengan Rusia diantaranya untuk mengaplikasikan teori-teori hubungan internasional yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan, kemudian mengetahui sejarah serta perkembangan hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia, selanjutnya untuk lebih mengetahui factor yang menjadi alasan Indonesia memilih Rusia sebagai partner kerjasama internasional.

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian social dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan situasi yang dianggap relevan secara obyektif dan didasari pada fakta-fakta yang terjadi, dan kemudian diambil kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku ,jurnal, surat kabar, dan internet.



## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam empat bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Teori yang melandasi penelitian, Tujuan penelitian, serta metodologi yang dipakai dalam penelitian.
- BAB II Menguraikan Dinamika Hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia, sebelum masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
- BAB III Membahas tentang Kerjasama Indonesia dan Rusia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang. Yudhoyono periode (2004-2009).
- BAB IV Berisi tentang pembuktian hipotesa mengenai berbagai pertimbangan Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Rusia (2004-2009).
- BAB V Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.